



# Pegawai DLH Kota Jogja Peras Pebisnis

**SLEMAN**—Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY membekuk seorang tenaga bantuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja karena memeras pengusaha warnet yang akan mengurus izin.

*Irwan A. Syambudi & Ujang Hasanudin  
redaksi@harianjogja.com*

Iwan Ariwanto, tenaga bantuan yang berperilaku lancung itu, diduga minta pelicin untuk pengurusan izin jalan masuk (*in gang*) dan izin mendirikan bangunan (IMB).  
"Pelaku meminta pembayaran secara paksa sebesar Rp12,5 juta untuk mengurus *in gang*. Sebelumnya dia telah lebih dahulu meminta Rp15 juta untuk mengurus IMB," kata Ketua Satgas Saber Pungli DIY Kombes Pol. Budi Yuwono saat melakukan gelar perkara di Polda DIY, Selasa (23/1).  
Iwan Ariwanto adalah penduduk Kecamatan Jetis yang telah bekerja sebagai tenaga bantuan di DLH Kota Jogja selama 10 tahun. Dia sudah paham seluk beluk pemberian rekomendasi maupun perizinan yang



*Harian Jogja/Irwan A. Syambudi*

**Ketua Satgas** Saber Pungli DIY Kombes Pol Budi Yuwono (dua kiri) saat gelar perkara pungli di Mapolda DIY, Selasa (23/1).

- ▶ **Satgas Saber Pungli DIY** sebelumnya pernah menggelar OTT di Kantor Imigrasi Jogja.
- ▶ **Pemerintah Kota Jogja** menyatakan pegawai yang lancung tidak merepresentasikan institusi secara keseluruhan.

dikeluarkan DLH sehingga berani memeras pengusaha yang berniat mendirikan Internet Cafe Neticity di Jl. Ipda Tut Harsono, Kota Jogja.  
Menurut Kombes Pol. Budi, modus Ariwanto saat memeras korbannya adalah berdalih izin *in gang* harus segera diselesaikan terlebih dahulu agar dapat dilampirkan sebagai syarat IMB. Namun, setelah uang tersebut dibayarkan, ternyata IMB tidak terbit.

"Kebetulan ada permohonan yang disampaikan dari Neticity melalui yang bersangkutan [pelaku]. Sebagai pegawai di bagian pelayanan, dia terima permohonan ini dan memprosesnya. Sebenarnya tidak ada biaya, tapi dia ciptakan seolah-olah ada biaya," kata Budi yang juga merupakan Inspektur Pengawas Daerah (Irwassa) Polda DIY.

● Lebih Lengkap Halaman 8

## Pegawai DLH...

Kepala DLH Kota Jogja Suyana mengatakan penyalahgunaan wewenang yang dipraktikkan anak buahnya tidak merepresentasikan DLH. "Itu hanya oknum," kata dia.

Netcity mengajukan izin penebangan pohon di sekitar pintu masuk area warnet. Izin tersebut sudah beres. Netcity sanggup mengganti pohon-pohon yang hilang dengan 50 pohon pucuk merah. Penggantian pohon tersebut, kata Suyana, sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.38/2010. Pasal 9 Ayat 2 Perwal tersebut menjelaskan jumlah pohon pengganti disesuaikan dengan diameter dan tinggi pohon yang ditebang.

Dia menegaskan pegawai DLH yang mengutip pungli dengan dalih penebangan pohon untuk gang masuk tidak dibenarkan. "Itu masuk dalam kategori pemerasan. Urusan dengan DLH sudah selesai, menebang pohon sudah diganti pohon," kata Suyana.

### Menyalahgunakan Kekuasaan

Iwan Ariwanto diringkus Satgas Saber Pungli pada Kamis (18/1) malam sekitar pukul 20.30 WIB ketika hendak bertemu korban di halaman parkir Netcity. Satgas Saber Pungli berhasil menyita Rp12,5 juta duit pungli, serta dua lembar kuitansi, masing-masing Rp15 juta untuk mengurus IMB dan Rp12,5 juta untuk mengurus *in gang*. Terdapat pula bukti rekaman suara dan rekaman CCTV saat pelaku bertransaksi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol. Gatot Agus Budi Utomo mengatakan hanya

Ariwanto yang dicokok. Adapun pengelola Netcity yang namanya dirahasiakan hanya menjadi saksi karena dia dipaksa menyerahkan sogokan.

Ariwanto disangka menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (e) Undang-Undang (UU) No.31/1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman pidana seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," kata Gatot.

Pemerintah Kota Jogja masih menunggu laporan resmi DLH mengenai kelakuan Ariwanto. Laporan itu bakal menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi. "Saya belum bisa banyak bicara karena belum ada laporannya. Nanti nunggu laporan resmi dulu," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja, Maryoto, di Balai Kota Jogja, Selasa (23/2).

Maryoto mengatakan tenaga bantuan diangkat oleh masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan sistem perpanjangan kontrak kerja setiap tahun. "Sebelum diangkat dimintakan rekomendasi BKPP dulu," kata dia.

### Operasi Kedua

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Iwan Ariwanto adalah razia kedua Satgas Saber Pungli DIY sejak dikukuhkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 1 November 2016.

Tiga hari setelah dibentuk, yakni pada 4 November dua tahun lalu, Satgas Saber Pungli DIY langsung menampakkan taring. Sasarannya adalah Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja. Delapan orang dijarah karena diduga berbuat serong dalam pengurusan paspor. Satu pejabat di Kantor Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu, Satgas Saber Pungli merampas duit Rp11,5 juta, lima gadget, dan sejumlah berkas sebagai barang bukti.

Pungli menjadi perhatian nasional sejak Presiden Joko Widodo berpidato di hadapan gubernur pada 20 Oktober 2016. Jokowi mengeluhkan banyaknya pungli di instansi-instansi pemerintah yang menjadi biang melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pengusaha yang mengurus izin mesti mengeluarkan ongkos dalam jumlah besar gara-gara upeti yang tidak sah.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menekankan pentingnya kemudahan usaha untuk mengerek perekonomian dan meningkatkan daya saing. "Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh," kata Presiden beberapa waktu lalu.

Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada akhir Oktober 2016 kemudian bergerak dan merayap di semua daerah. Puluhan ribu laporan diterima, ratusan OTT digelar, ribuan orang-orang curang dijadikan tersangka, dan duit ratusan miliar rupiah disita sebagai barang bukti (*lihat grafis*).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. BKPP			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005